

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Hasil Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2018

“Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan”

Jakarta, 21 Maret 2018

---

**PENDAHULUAN.** Urgensi informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan tercantum dalam UU No. 25/2004 menyebutkan bahwa “seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data dan informasi (spasial dan non spasial) yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan”. Hal tersebut diperkuat dengan UU No. 17/2007 yang menyebutkan “aspek spasial harus diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkat pemerintahan (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota). Penyelenggaraan IG, membantu dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional secara efektif, efisien dan ekonomis.

Tingginya kebutuhan akan data dan informasi geospasial perlu diantisipasi dengan jaminan ketersediaan data dan informasi geospasial nasional yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standard dan mudah diakses. Namun saat ini, pemanfaatan data dan informasi geospasial pada proses penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan publik masih belum optimal. Hal ini terkait dengan beberapa aspek, yaitu (1) koordinasi; (2) produksi; (3) penyebarluasan; (4) pemanfaatan; serta (5) sumberdaya manusia, kelembagaan, IPTEK dan industri Informasi Geospasial.

Pentingnya peran Informasi Geospasial di dalam perencanaan pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya PP No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu, pendekatan yang pada awalnya “*money follow function*” berubah menjadi pendekatan “*money follow program*”.

Sampai saat ini, realisasi penyelenggaraan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan masih memiliki beberapa hambatan diantaranya, koordinasi belum optimal, kecenderungan ego-sektoral masih tampak; ketersediaan IG masih belum

sesuai dengan kebutuhan; aksesibilitas data dan IG masih terkendala aturan dan infrastruktur; serta kapasitas SDM IG masih kurang memadai.

RAKORNAS IG dilaksanakan untuk memenuhi amanat UU No 4 tahun 2011 tentang IG dan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yang menyatakan bahwa BIG diantaranya menyusun rencana dan program di bidang IG secara nasional. Berlatar belakang di atas, maka agenda RAKORNAS IG 2018 adalah (i) mengevaluasi penyelenggaraan IG untuk pemenuhan RPJMN 2015-2019 bidang IG; (ii) mengevaluasi implementasi percepatan kebijakan satu peta 2016-2019 dan (iii) menyiapkan bahan masukan RPJMN IV (2020-2024) bidang IG. Adapun tema, RAKORNAS IG 2018 adalah: “Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan”.

RAKORNAS IG 2018 ini merupakan puncak acara yang sudah dimulai bersama dengan pemangku kepentingan melalui serangkaian rapat pendahuluan yang diselenggarakan pada 2 Februari 2018 serta Pra RAKORNAS IG pada tanggal 12 Maret 2018. Kedua rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka penyiapan bahan RAKORNAS IG 2018 dalam bentuk draf kesepakatan yang akan diputuskan pada hari ini.

**PENYELENGGARAN IG UNTUK PEMENUHAN RPJMN 2015 – 2019.** Target penyelenggaraan informasi geospasial baik informasi geospasial dasar maupun informasi geospasial tematik yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 secara umum telah terpenuhi. Namun demikian, ada beberapa Kementerian/Lembaga belum memenuhi target baik lokus maupun tema yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional yang menyebabkan adanya perubahan program dan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial pada Kementerian/Lembaga, sehingga Kementerian/Lembaga perlu penyesuaian-penyesuaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Kementerian/Lembaga pada tahun 2018 telah melaksanakan penyelenggaraan informasi geospasial sesuai dengan Renja K/L/P yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 dan prioritas

nasional. Kementerian/Lembaga agar mengawal pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial yang telah tercantum dalam APBN 2018.

Rencana aksi penyelenggaraan IG diarahkan dan difokuskan untuk menyelesaikan pemenuhan target RPJMN 2015-2019 terutama yang belum terselesaikan sampai akhir tahun 2018. Kementerian PPN/Bappenas dan BIG bersama Kementerian/Lembaga terkait lainnya akan mengawal rencana aksi pemenuhan target 2019. Hasil kesepakatan dalam RAKORNAS 2018 menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan IG tahun anggaran 2019 dan akan dibahas saat Musrenbangnas 2018.

**PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA.** RAKORNAS IG 2018 merupakan bentuk upaya BIG dalam mengawal pelaksanaan Kebijakan IG Nasional yang menjadi Prioritas Pemerintah, salah satunya adalah Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta (PKSP). Melalui Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta diselenggarakan pada tingkat ketelitian skala 1:50.000 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan Perpres No. 9/2016 telah berlangsung selama 3 semester dengan cakupan wilayah meliputi Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Bali-Nusatenggara. Target penyelesaian PKSP secara nasional terdiri dari 85 tema dengan jumlah tema yang berbeda-beda untuk masing-masing wilayah (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali-Nusatenggara, Jawa, Maluku dan Papua).

Pada tahun 2016, kegiatan PKSP fokus pada penyelesaian kompilasi dan integrasi di wilayah Kalimantan. Sedangkan pada tahun 2017 kegiatan difokuskan pada wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Di tahun 2017 juga telah dimulai tahapan sinkronisasi pada wilayah Kalimantan. Adapun jumlah tema yang telah teridentifikasi pada wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Bali-Nusatenggara masing-masing sebanyak 80, 84, 82 dan 80 tema Informasi Geospasial Tematik (IGT). Jumlah IGT yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara hingga Maret 2018 (RAKORNAS IG) masing-masing sebanyak 70, 69, 66 dan 64 tema. Peta tematik yang masih belum terkompilasi dan terintegrasi adalah IGT Batas Desa, Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTLN), Peta Wilayah Rinci Pertahanan. Pada 2018, target PKSP adalah menyelesaikan wilayah Jawa, Maluku dan Papua dengan target masing – masing adalah 83, 82 dan 83 tema yang akan disebarluaskan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Status

capaian IGT tematik sampai 2017 yang belum terkompilasi adalah terintegrasinya IGT MHA : IGT Hutan Adat (KLHK) dan IGT Hak Koomunal (ATR/BPN) sehingga dari 85 tema IGT yang ditargetkan Perpres 9/2016 telah memenuhi 84 tema IGT yang terintegrasi.

Dalam rangka memenuhi target Implementasi KSP, K/L/P yang menjadi Penanggung jawa IGT dalam Renaksi Perpres 9/2019 telah mengusulkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 yang merupakan bagian dari 5 Prioritas Nasional (PN) maupun Non PN sebesar Rp. 277.815.813.400 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratuslima belas juta delapan ratustiga belas ribu empat ratus rupiah). Anggaran yang diusulkan Tahun 2019 adalah untuk mengisi *gap* pemenuhan lokasi (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali Nusra, Jawa, Maluku, Papua maupun untuk melakukan *Updating*.

### **BAHAN MASUKAN RPJMN 2020 – 2024 BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.**

RPJMN IV (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan IG diarahkan untuk menjawab kebutuhan penyelesaian program secara tuntas (*holistic*), dengan melibatkan partisipasi KLP dan masyarakat (*integrated*) sesuai prioritas (*thematic*) pada lokasi tertentu (*spatial*). Selain itu RPJMN IV (2020-2024) harus sudah memasukkan program SDGs dan kebijakan satu data. Berpedoman pada hal tersebut, maka RAKORNAS IG 2018 telah membahas program dan kegiatan bidang IG untuk masukan RPJMN IV (2020-2024) yang akan dilaksanakan oleh K/L/P/P.

Program dan kegiatan penyelenggaraan IG yang diusulkan sebagai bahan masukan penyusunan RPJMN 2020 – 2024 bidang IG berdasarkan pada hasil pelaksanaan RPJMN 2015 -2019, kebijakan SDGs dan Kebijakan Satu Data. Pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 bidang IG masih belum tercapai secara optimal, masih ada *gap* antara capaian dan target yang telah ditetapkan.

Presiden Jokowi sangat serius dengan pelaksanaan indikator-indikator SDGs di Indonesia. Hal ini terlihat dengan masuknya program SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tidak terlepas dari keragaman ketersediaan data IG untuk mengukur, memonitor dan pelaksanaan agenda SDGs. Untuk itu, pada penyusunan program dan kegiatan masukkan penyusunan RPJMN 2020 – 2024 juga telah mengacu pada 17 tujuan dan 169 capaian SDGs.

Para pemangku kepentingan bidang IG yang berasal dari K/L/P/P telah sepakat menentukan arahan dan kebijakan penyelenggaran IG pada RPJMN 2020 – 2024. Pemenuhan IG pada skala besar menjadi fokus penyelenggaran IG pada RPJMN 2020-2024, diantaranya adalah IG darat minimal 1:5.000 dan laut minimal 1:10.000. serta skala *fit for purpose* sesuai peruntukannya, misalnya: RTRW, RDTR, KEK, KI, batas desa, metropolitan, *underground utility*, *smart city (resillience, liveable, bussiness)*, restorasi gambut, reforma agraria, pelabuhan, keselamatan navigasi, ALKI, pulau-pulau terluar, dan mitigasi bencana alam.

Selain itu juga telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan tentang (i) pentingnya dukungan setiap K/L/P/P dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) mendukung operasionalisasi JIGN secara organisatoris / kelembagaan, (ii) ketersedianya SDM bidang IG sesuai SKKNI di pusat maupun daerah merupakan, (iii) optimalisasi koordinasi K/L/P/P untuk mencapai keseimbangan antara penyelenggara (*supply*) dan pengguna (*demand*) data dan IG, (iv) terobosan untuk kemandirian iptek melalui jejaring litbang IG (Litbang K/L/P, perguruan tinggi, industri), (v) penciptaan iklim iklim usaha dan investasi yang lebih baik demi peningkatan kapasitas swasta dalam penyelenggaraan IG dan (vi) penyediaan payung hukum terkait mekanisme dan skema rencana pendanaan dalam penyelenggaraan kebutuhan informasi geospasial oleh K/L/P dan Pemda.

**REKOMENDASI.** Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2018 telah menghasilkan rekomendasi untuk penyelenggaran IG di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perlu menghidupkan kembali BATNAS (Bathimetri Nasional) atau konsorsium nasional dalam pemenuhan data kelautan nasional.
2. Perlu penyusunan peraturan BIG tentang metode pemetaan lahan gambut skala 1:50.000 dan skala 1:2.500.
3. Peningkatan pemanfaatan IG melalui Ina-Geoportal.

4. Perlu sinkronisasi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana wilayah pertahanan
5. Diperlukan peraturan perundangan tentang klasifikasi data dalam rangka berbagi pakai data KSP untuk percepatan sinkronisasi.
6. Pemenuhan target tema-tema KSP yang belum terpenuhi agar dipenuhi pada tahun 2019.
7. Perlu komitmen bagi K/L/P yang belum memenuhi target-target KSP tahun 2018 agar menganggarkan seluruh target yang tercantum dalam rencana aksi.
8. Dokumen rinci terhadap bahan masukan RPJMN 2020-2024 dirumuskan bersama antar K/L/P dan monitoring dilakukan secara berkala terhadap hasil kesepakatan oleh BIG bersama Kementerian PPN/Bappenas

**PENUTUP.** RAKORNAS IG 2018 telah berhasil mengevaluasi pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 bidang penyelenggaraan IG dan telah menyepakati rencana aksi 2019 untuk program dan kegiatan yang belum terlaksana. RAKORNAS juga telah membahas pelaksanaan KSP 2016 - 2019 serta pengusulan program dan kegiatan penyelenggaraan IG untuk RPJMN 2020 - 2024 yang mendukung SDGs, Kebijakan Satu Data dan Kebijakan Satu Peta. Implementasi hasil kesepakatan RAKORNAS IG 2018 membutuhkan dukungan seluruh K/L/P. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan dan pengawalan masing-masing K/L/P untuk memastikan usulan seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan IG tercantum dalam dokumen anggaran setiap tahunnya.